

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Kawal Sekolah Gratis

Hitungan Dewan Butuh Dana Rp280 Miliar, Pemprov Alokasikan Rp171 Miliar

JAKARTA—Kalangan anggota DPRD DKI bertekad mengawal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang akan memberi bantuan sekaolah swasta kepada siswa kurang mampu. Terutama, untuk para siswa yang tak lolos seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang memprioritaskan umur.

Agar proses bantuan tepat sasaran, anggota Komisi C DPRD DKI S. Andyka meminta Pemprov DKI segera memverifikasi data bantuan. Sebelum dana itu dikucurkan, kata Andyka, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI harus menyiapkan database calon penerima bantuan.

"Ada sekitar 128 ribu anak yang akan dibantu uang pangkalnya di sekolah swasta. Ini enggak mudah oleh karenanya database harus jelas," kata Andyka, Rabu (22/7/2020). Akan tetapi, dirinya belum mengetahui apakah nantinya penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) otomatis mendapatkan biaya uang pangkal atau tidak.

"Saya kurang tahu. Namun intinya dari bantuan itu adalah untuk memastikan jangan sampai ada anak-anak di Jakarta yang putus sekolah. Jadi tujuannya supaya tidak ada yang putus sekolah," kata politisi Gerindra itu.

Terkait dengan sumber anggaran, Andyka mengatakan, DKI memiliki anggaran untuk merealisasikan bantuan itu. Pemprov DKI bisa mengambil anggaran dari belanja tak terduga (BTT) sebelum anggaran perubahan dibahas.

"Bantuan uang pangkal ini harus diverifikasi dan itu bisa dilakukan. Saya berharap yang terdampak langsung dengan COVID-19 jadi prioritas. Mereka sangat membutuhkan bantuan. Pemerintah harus ada di tengah-tengah masyarakat. Dari hitung-hitungan kita anggarannya paling sekitar Rp 280 miliar, DKI memiliki anggaran untuk itu," pungkasnya.

Data Bansos

Partai Demokrat DKI Jakarta berkomitmen mengawal bantuan uang pangkal sekolah untuk siswa yang tidak diterima di sekolah negeri kemudian melanjutkan ke sekolah swasta. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta H Ali Muhammad Johan Suharli, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menganggarkan bantuan itu melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) hingga Rp171 miliar.

Bantuan sebesar Rp171 miliar itu dihitung berdasarkan siswa yang orang tuanya menerima bantuan sosial (bansos) COVID-19. Anggaran sebesar Rp171 miliar itu, kata Ali, hanya bisa dialokasikan kepada 85.508 siswa yang

tidak diterima sekolah negeri yang menerima bansos COVID-19.

Sedangkan siswa yang tidak lolos PPDB DKI 2020 sebanyak 126.011 orang sehingga diperlukan anggaran sebesar Rp 247 miliar agar semua siswa itu bisa menerima bantuan uang pangkal. "Semua siswa yang tidak lolos PPDB itu harus dibantu, karena mereka itu terdampak COVID-19 juga, kondisi ekonomi mereka lagi tidak bagus," katanya.

Harus Diperbesar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai anggaran yang direncanakan Pemprov DKI untuk bantuan terhadap peserta didik tak lolos sekolah negeri seharusnya diperbesar. Anggaran Rp 171 miliar yang dialokasikan hanya cukup untuk menanggung uang pangkal. Seharusnya Pemprov DKI menggratiskan segala biaya sebagaimana sekolah negeri.

"Harusnya dibantu semuanya, jangan hanya uang pangkal. Kalau Pemprov dengar suara rakyat di bawah, semuanya teriak minta digratiskan masuk sekolah swastanya, bukan hanya uang pangkal," ungkap Zita. Menurutnya, pemprov seharusnya sensitif terhadap kondisi rakyat di masa pandemi COVID-19.

"Saya dan kawan-kawan DPRD akan kawal rencana dana Rp171 miliar untuk sekolah gratis," ujarnya. Menurutnya, memang seharusnya siswa di DKI tidak hanya yang berada di sekolah negeri. Sebagian ada di sekolah swasta juga. Tetapi, semuanya harus diperhatikan oleh pemprov.

"Wacana bantuan Rp171 miliar ini harus kita kawal. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Ini baru rencana, euforianya jangan berlebihan dulu," pungkasnya. Zita mengatakan, dilihat dari rincian, Rp171 miliar itu hanya cukup untuk membayar uang pangkal saja. Sedangkan yang besar di sekolah swasta adalah uang gedungnya.

Menurut Zita, seharusnya tidak ada alasan pemprov tidak bisa bantu menggratiskan sekolah swasta. Malahan, di daerah lain sekolah swasta digratiskan, salah satunya adalah di Brebes, Jawa Tengah. Padahal Jakarta memiliki kemampuan APBD yang jauh lebih besar dari daerah penghasil telur asin dan bawang merah itu. Pemprov DKI perlu belajar dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pemkab Brebes walau dengan kemampuan anggaran di bawah ibu kota, tapi kenyataannya berhasil menggratiskan peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta.

"Sekarang ini masuk di APBD perubahan. Sumber paling aman dari BTT (bantuan tak terduga). Maksimalkan juga program kerja sama dengan pihak swasta untuk biaya pendidikan siswa yang terkena dampak COVID-19. Kalau kita mau, pasti bisa untuk itu," tegasnya.

Menurut Zita, untuk yang dibantu, tentu harus ada kriterianya. Namun, saat ini data Dinas Sosial DKI belum tentu relevan. "Banyak orang mampu bayar makan, tapi untuk bayar sekolah sudah tidak cukup. Maka data diambil saja dari jalur PPDB kemarin, data siswa yang tertolak lengkap di situ. Jadi tidak pusing lagi karena data. Kita butuh kerja cepat. Niatnya sudah baik, strateginya juga harus baik, biar hasilnya baik," jelas politisi muda Partai Amanat Nasional itu.

Zita mengatakan, sudah sepatutnya Pemprov berkolaborasi dengan sekolah-sekolah swasta.

"DKI punya APBD puluhan triliun, ini masuk di APBD Perubahan, sumber paling aman dari BTT (Bantuan Tak Terduga). Maksimalkan juga program kerja sama dengan pihak swasta untuk biaya pendidikan siswa yang terkena dampak COVID-19," tuturnya.

Berbagai Jenjang

Pemprov DKI berencana mengalokasikan anggaran Rp 171 miliar sebagai bentuk bantuan terhadap peserta didik yang tak lolos sekolah negeri. Sumber anggaran diproyeksikan berasal dari anggaran belanja tak terduga, perubahan APBD 2020, atau KSBB pendidikan creative financing pola asuh. Nilai anggaran tersebut mencakup untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK.

"Hasil padanan data dari Dinas Sosial total anggarannya Rp 171,065,500,000," ujar Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DKI Jakarta, Catur Laswanto. Catur menuturkan bantuan tersebut diberikan bagi peserta didik tidak mampu yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta. (dni)

Ada sekitar 128 ribu anak yang akan dibantu uang pangkalnya di sekolah swasta. Ini enggak mudah oleh karenanya database harus jelas."

S. Andyka

Anggota Komisi C DPRD DKI